

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan setiap orang. Secara naluri hal ini terlihat dari sikap serta tindakan hampir setiap individu untuk berusaha meningkatkan penghasilannya dengan berbagai cara agar dapat menyisihkan atau menginvestasikan penghasilan mereka untuk tujuan masa datang. (Harefa, 2002)

Hal ini terlihat dari sikap dan tindakan hampir setiap orang yang menginginkan kesejahteraan hidupnya, baik pada saat ini sewaktu aktif kerja maupun pada saat memasuki purna bakti di usia lanjut. Mereka menginginkan suatu jaminan dan kepastian akan kelangsungan kesejahteraan hidup mereka saat mereka sudah tidak bekerja lagi. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan usaha-usaha untuk menyisihkan dan menginvestasikan penghasilan yang mereka dapatkan selama bekerja. Untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu maka diadakan program pensiun yang dirasakan cukup penting sebagai suatu solusi terhadap masalah kesejahteraan ekonomi setiap individu. Seperti yang dikatakan Subianto, (1994):

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap II peran swasta dan dana non APBN diharapkan semakin meningkat dan semakin penting. Melalui program pensiun diharapkan tabungan masyarakat dapat terakumulasi dan dikelola secara bijak dan aman agar kesejahteraan pensiunan terjamin dan kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyesihan pendapatan karyawan selama masa kerja untuk kemudian diinvestasikan sehingga pada saat karyawan pensiun atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya akan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya yang dikenal dengan manfaat pensiun.

Dana pensiun sebagai suatu bentuk institusi keuangan yang dapat dibentuk oleh berbagai unit kegiatan baik pemerintah maupun swasta, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana peserta pensiun. Dana tersebut bersifat jangka panjang karena

urusan yang terkumpul dari peserta saat ini baru akan ditarik pada saat peserta pensiun memasuki masa purna bakti di usia lanjut. Dengan demikian program Dana Pensiun memberikan kesinambungan penghasilan kepada para pesertanya dimana kesejahteraan dan pendapatan seseorang meski telah berstatus pensiun menjadi terjamin. Jaminan ini memberikan pengaruh rasa aman dan tenang bekerja pada karyawan sehingga dapat menjadi sarana peningkatan produktivitas karyawan. Selain itu pula Dana Pensiun menggambarkan hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dan karyawan.

Dana Pensiun mulai berkembang setelah dikeluarkannya UU No. 11/1969 tentang hak pensiun bagi pegawai negeri. Walaupun Undang-Undang tersebut hanya meliputi pensiun bagi pegawai negeri dan anggota ABRI, namun itu menjadi tolak ukur bagi Dana Pensiun swasta yang berkembang di tahun 70-an.

Pada tanggal 20 April 1992 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menjadi landasan hukum dan operasional yang mantap bagi Dana Pensiun di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 11/1992 Dana Pensiun berdiri sebagai badan hukum yang terpisah dari pendirinya sehingga kelangsungan pembayaran manfaat pensiun terjamin dengan adanya pemisahan antara asset Dana Pensiun dengan pendirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Pensiun memerlukan sistem pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keuangan Dana Pensiun.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pihak yang kompeten dalam menentukan standar laporan keuangan, mengeluarkan PSAK No.18 tentang Akuntansi Dana Pensiun serta PSAK No. 24 tentang Biaya Manfaat Pensiun untuk dijadikan standar Akuntansi Dana Pensiun. Sedangkan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. 2345/LK/2003 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.

Laporan Keuangan Dana Pensiun berbeda dari laporan keuangan perusahaan atau institusi keuangan lainnya. Laporan Keuangan Dana Pensiun memiliki karakteristik yang spesifik karena sifat Dana Pensiun yang berbeda dari perusahaan pada umumnya. Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri dari Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Neraca, Laporan Mengenai Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya bentuk standar akuntansi dan pelaporan keuangan Dana Pensiun, diharapkan bahwa informasi yang terdapat didalam laporan keuangan akan memberi gambaran yang jelas dan sebenar-benarnya mengenai posisi keuangan Dana Pensiun tersebut sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, Dana Pensiun yang ada di Indonesia senantiasa mengikuti bentuk standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Berdasarkan serangkaian uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

**“PENERAPAN PSAK NO.18 MENGENAI AKUNTANSI DANA PENSIUN
PADA LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN I Th. 2006”**

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk dapat melakukan penelitian yang baik, maka penulis membatasi masalah penelitian pada:

1. Apakah Laporan Keuangan Dana Pensiun I telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.2345/LK/2003 ?
2. Apakah portofolio investasi yang dilakukan Dana Pensiun I sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penyajian laporan keuangan Dana Pensiun I sudah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 2345/LK/2003.
2. Untuk menganalisa apakah portofolio invenstasi yang dilakukan Dana Pensiun I sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK.06/2002.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam Akuntansi Keuangan, khususnya mengenai Akuntansi Dana Pensiun dan juga untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama kuliah dalam praktik dunia usaha.

2. Pihak Dana Pensiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak Dana Pensiun sebagai bahan masukan apabila terdapat permasalahan dalam mengelola Dana Pensiun.

3. Pihak Lain

Bagi pihak lain, khususnya masyarakat dilingkungan pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai praktik Akuntansi Dana Pensiun.

1.5. Rerangka Pemikiran

Program Pensiun merupakan suatu program untuk membentuk dana yang terpisah yang manfaatnya akan diberikan kepada karyawan setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Program Pensiun tersebut dibentuk oleh suatu badan hukum yang disebut Dana Pensiun.

Program Pensiun dibagi atas dua jenis, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Masing-masing Program Pensiun tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pendiri atau mitra pendiri (jika ada) serta dewan pengawas harus menetapkan kebijaksanaan investasi sebagai pedoman bagi pengurus Dana Pensiun dalam melakukan investasi kekayaan Dana Pensiun karena investasi merupakan salah satu sumber pendanaan Dana Pensiun.

Standar Akuntansi Dana Pensiun meliputi PSAK No.18 tentang Akuntansi Dana Pensiun dan PSAK No.24 tentang Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.2345/LK/2003 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Didalam penyajian pelaporan

keuangan Dana Pensiun terutama yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan Dana Pensiun
 1. Laporan Aktiva Bersih
 2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih
 3. Neraca
 4. Perhitungan Hasil Usaha
 5. Laporan Arus Kas
 6. Catatan Atas Laporan Keuangan
- b. Laporan mengenai Kewajiban Aktuarial
- c. Informasi tambahan
 1. Portofolio Investasi
 2. Rincian biaya yang merupakan beban dana pensiun selama satu periodeSelain itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun pasal 19, bahwa Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan RI mengenai:

- a. Laporan investasi semesteran
- b. Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku.

Kewajiban penyampaian hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut tidak berlaku bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

 - a. Selama tahun buku, investasi Dana Pensiun hanya berupa deposito berjangka, deposito *on call*, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, misalnya: SUN (Surat Utang Negara).
 - b. Pada akhir tahun buku, total investasi Dana Pensiun kurang dari Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Dengan adanya standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Keuangan, diharapkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun, baik Pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, pihak ekstern seperti Bank maupun peserta Dana Pensiun selain dapat mengetahui posisi keuangan Dana Pensiun, dapat pula menjadi bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan Dana Pensiun.

1.6 Metoda Penelitian

Metoda yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu, suatu metoda penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun serta menyajikan hasil-hasil penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas obyek yang diteliti. Sedangkan komparatif adalah membandingkan antara teori serta peraturan-peraturan Dana Pensiun dengan praktek atas obyek yang diteliti untuk kemudian diambil kesimpulan.

Untuk pengumpulan data yang diperlukan adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, atau berdasarkan hasil penelitian terdahulu (*library reseach*). Pada dasarnya data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku wajib dan buku-buku referensi yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas maupun diteliti.
2. Bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Seperti majalah, Surat Kabar dan lain-lain.
3. Keputusan-keputusan dan peraturan yang ada.
4. Laporan Keuangan dan Laporan Aktuaris

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Dana Pensiun I di Jalan Moch. Toha, Bandung. Pengambilan data dilakukan dari tanggal 3 oktober 2007 sampai dengan tanggal 26 November 2007.